

ABSTRAK

Diah Karina Sabaniah Putranto (01656180150)

“PEMBATALAN AKTA HIBAH HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN ISTRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 190/PDT.G/2018/PN.KPG)”

(xi + 104 halaman)

Manusia hidup di dunia ini berpasang-pasangan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan dipersatukan dalam sebuah perkawinan guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pada suatu perkawinan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, suami maupun istri mencari penghasilan bersama atau salah satunya. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama. sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan. Harta memiliki fungsi sosial yaitu dengan digunakannya untuk kepentingan umum, seperti zakat, sadaqah dan hibah. Tujuan dari harta kekayaan tersebut untuk meraih kesejahteraan dalam sebuah perkawinan akan tetapi ada kalanya harta bersama menjadi sumber perselisihan antara suami dan Istri. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah Bagaimana pengaturan pemberian hibah dari pemberi hibah yang terikat perkawinan, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Apakah putusan hakim tentang pembatalan hibah dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Kpg telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian hukum ini pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan Studi Pustaka. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah Pasal 1676 KUHPperdata menjelaskan hibah dapat diberikan kepada siapa saja sepanjang orang tersebut tidak dikecualikan oleh undang-undang. Penghibahan antara suami dan Istri pada KUHPperdata dilarang selama perkawinan masih berlangsung. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Kpg telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dimana Penggugat dapat membuktikan bahwa ia adalah Istri yang sah dari Benyamin Davidson Kalelena (alm), dapat membuktikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 332/Desa Lasiana merupakan Harta Bersama, serta Akta Hibah yang dilakukan oleh Benyamin Davidson Kalelena (alm) adalah Batal Demi Hukum dan Obyek Sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat sebagai Harta Bersama yang belum dibagi.

Referensi: 56 (1983-2016)

Kata Kunci: Perkawinan, Notaris dan Pembatalan Hibah.

ABSTRACT

Diah Karina Sabaniah Putranto (01656180150)

“CANCELLATION OF JOINT PROPERTY GRANTS DEED WITHOUT WIFE'S APPROVAL (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 190/PDT.G/2018/PN.KPG)”

(xi + 104 pages)

Humans live in this world in pairs, namely a man and a woman united in a marriage to form a happy and eternal family. In a marriage in order to meet the needs of his life, husband and wife seek income together or one of them. According to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, assets acquired during the marriage period are joint assets. While the inheritance is the property obtained by each party before the marriage. Assets have a social function, namely by using them for public purposes, such as zakat, sadaqah and grants. The purpose of these assets is to achieve prosperity in a marriage, but there are times when joint property becomes a source of dispute between husband and wife. The formulation of the problem in this thesis is how is the arrangement of grants from grantors who are bound by marriage, in terms of the Civil Code and Law No.1 of 1974 concerning Marriage and what is the judge's decision on the cancellation of grants in Decision Number 190/Pdt.G/2018/PN Kpg has complied with the applicable laws and regulations. In this legal research a normative juridical approach is carried out by means of a literature study. The result of the research in this thesis is Article 1676 of the Civil Code explains that grants can be given to anyone as long as that person is not excluded by law. Grants between husband and wife in the Civil Code are prohibited as long as the marriage is still in progress. The legal considerations carried out by the judge in Decision Number 190/Pdt.G/2018/PN Kpg are in accordance with the applicable law wherein the Plaintiff can prove that she is the legal wife of Benjamin Davidson Kalelena (late), can prove the Certificate of Ownership Number: 332/Desa Lasiana is a Joint Asset, and the Deed of Grant made by Benjamin Davidson Kalelena (late) is null and void and the object of the dispute is returned to the Plaintiffs as joint assets that have not been divided.

References: 56 (1983-2016)

Keywords: Marriage, Notary and Grant Cancellation.